

# Konsep masyarakat madani dalam perspektif islam dan demokrasi serta relevansinya bagi kehidupan sosial di indonesia

Naisyila Faizatul Mufarrihah

Program studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [naisyilafaiza@gmail.com](mailto:naisyilafaiza@gmail.com)

## Kata Kunci:

Masyarakat Madani, Civil Society, Perspektif Islam, Pendidikan Islam, Demokrasi, Keadilan Sosial, Pluralisme, Kehidupan Sosial Indonesia.

## Keywords:

Civil Society, Madani Society, Islamic Perspective, Islamic Education, Democracy, Social Justice, Pluralism, Social Life in Indonesia.

## ABSTRAK

Konsep masyarakat madani merupakan gagasan tentang tatanan masyarakat yang beradab, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai keadilan, persamaan, kebebasan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, konsep masyarakat madani memiliki landasan teologis dan historis yang kuat, yang dapat ditelusuri dari praktik kehidupan masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Madinah dibangun di atas prinsip tauhid, keadilan, persaudaraan, toleransi, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadaban di tengah dinamika masyarakat modern yang berlandaskan nilai kemanusiaan universal dan berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep masyarakat madani dalam perspektif Islam serta menganalisis relevansinya bagi kehidupan sosial di Indonesia yang bersifat plural dan multikultural. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber-sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai masyarakat madani dalam Islam memiliki kesesuaian yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam aspek keadilan sosial, persatuan, toleransi antarumat beragama, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, penguatan konsep masyarakat madani berbasis nilai-nilai Islam sangat relevan untuk dijadikan kerangka etis dalam membangun kehidupan sosial Indonesia yang damai, adil, dan berkeadaban.

## ABSTRACT

The concept of civil society refers to a civilized social order that upholds democratic values, justice, equality, freedom, and respect for human rights. From an Islamic perspective, the concept of civil society has strong theological and historical foundations, particularly reflected in the life of the Madinan community during the time of Prophet Muhammad SAW. The Madinan society was built upon the principles of monotheism, justice, brotherhood, tolerance, and deliberation. This article aims to examine the concept of civil society from an Islamic perspective and analyze its relevance to social life in Indonesia, a plural and multicultural country. The research method used is library research by examining primary sources such as the Qur'an and Hadith, as well as secondary sources including books and scientific journals. The results indicate that the values of civil society in Islam are highly relevant to Indonesia's national values, such as social justice, unity, religious tolerance, and public participation in social and political life. Therefore, strengthening the concept of civil society based on Islamic values can contribute to building a harmonious, just, and civilized social life in Indonesia.

## Pendahuluan

Wacana masyarakat madani menjadi salah satu isu penting dalam diskursus sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia, khususnya sejak era reformasi. Konsep ini sering



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dikaitkan dengan upaya membangun masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan berkeadaban, di mana warga negara memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. Dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural, masyarakat madani dipandang sebagai pilar penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. (Fazillah, 2017) Istilah masyarakat madani sering dipahami sebagai terjemahan dari konsep civil society yang berkembang dalam tradisi Barat. Namun, para pemikir Muslim, seperti Nurcholish Madjid, menegaskan bahwa masyarakat madani bukan sekadar adopsi konsep Barat, melainkan memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam. Istilah madani merujuk pada kota Madinah, tempat Nabi Muhammad SAW berhasil membangun tatanan masyarakat yang beradab, inklusif, dan berkeadilan.

Masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan contoh nyata kehidupan sosial yang harmonis di tengah pluralitas. Di dalamnya hidup berbagai kelompok agama dan suku, seperti kaum Muslim, Yahudi, dan pagan Arab, yang diikat oleh kesepakatan sosial-politik yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah mengakui pentingnya hukum, kesetaraan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti konflik horizontal, intoleransi beragama, ketimpangan sosial, dan melemahnya etika publik. Kondisi ini menuntut adanya penguatan nilai-nilai moral dan sosial yang mampu menjadi fondasi kehidupan bersama. Nilai-nilai masyarakat madani dalam Islam, seperti keadilan (al-'adl), persaudaraan (ukhuwwah), toleransi (tasamuh), musyawarah (syura), dan tanggung jawab sosial, menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konsep masyarakat madani dalam perspektif Islam, dan (2) menganalisis relevansinya bagi kehidupan sosial di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan pemikiran Islam serta kontribusi praktis bagi pembangunan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadaban.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian.

## **Metode Pembahasan**

Metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis konsep masyarakat madani dalam perspektif Islam berdasarkan sumber-sumber normatif dan historis, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta praktik masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, metode analitis digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan relevansi nilai-nilai masyarakat madani tersebut dengan kondisi kehidupan sosial di Indonesia yang plural dan multikultural.

Melalui metode ini, penulis berupaya menghubungkan konsep teoritis dengan realitas sosial, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai urgensi dan implementasi konsep masyarakat madani dalam konteks keindonesiaan.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Masyarakat Madani**

(Ilma & Alfian, 2020) Globalisasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap sistem sosial masyarakat. Pengaruh tersebut memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai moral yang ditandai dengan menurunnya kualitas etika dalam kehidupan sosial. Selain itu, berbagai krisis multidimensional, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya, semakin sulit dihindari. Kondisi ini menuntut adanya perubahan sosial yang mendasar, sehingga pembentukan tatanan masyarakat baru menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Masyarakat baru yang diharapkan adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kemajuan, kesejahteraan, kebahagiaan, keterbukaan, dan keadilan. Masyarakat tersebut juga dituntut untuk saling menghormati dan menghargai, menegakkan hukum secara adil, menghormati hak asasi manusia, serta meninggalkan pola-pola kehidupan sosial yang bersifat negatif dan tidak konstruktif.

Secara umum, masyarakat madani dipandang sebagai bentuk ideal masyarakat yang dicita-citakan oleh berbagai bangsa. Masyarakat madani merupakan tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis, memiliki landasan religius dan nilai-nilai peradaban, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, istilah masyarakat madani mulai dikenal menjelang berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoriter. Setelah runtuhnya rezim tersebut, konsep masyarakat madani semakin sering dikemukakan, khususnya oleh kalangan intelektual modernis, sebagai refleksi dari keinginan untuk membangun sistem sosial baru yang lebih adil dan demokratis dalam kehidupan masyarakat Indonesia pascareformasi.

Munculnya wacana masyarakat madani juga merupakan respons terhadap upaya menempatkan peran agama dalam konteks masyarakat multikultural. Proses demokratisasi yang terus berlangsung melahirkan gagasan pluralisme serta tuntutan akan kesetaraan hak individu dalam kehidupan sosial, yang kemudian menjadi bagian penting dalam konsep masyarakat madani. Dalam sejarah Islam, masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW mencerminkan model masyarakat madani dengan karakter utama berupa kesetaraan, konsistensi moral (istiqamah), partisipasi aktif masyarakat, dan praktik demokratis dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, keadilan dan kesetaraan menjadi fondasi utama terbentuknya masyarakat madani, sementara demokratisasi muncul sebagai hasil dari partisipasi nyata masyarakat. Azyumardi Azra menegaskan bahwa masyarakat madani tidak hanya dipahami sebagai gerakan pro-demokrasi, tetapi juga sebagai upaya pembentukan masyarakat yang berkualitas dan berperadaban (civility). Konsep ini menekankan pentingnya kualitas moral, etika sosial, dan tanggung jawab warga dalam kehidupan bersama.

Senada dengan pandangan tersebut, Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa konsep masyarakat madani berakar pada makna civility, yang mengandung nilai toleransi serta kesiapan individu untuk menerima perbedaan pandangan politik dan perilaku sosial. Sikap ini menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dan damai dalam masyarakat yang plural. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani memiliki sejumlah karakteristik yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karakteristik tersebut mencerminkan tatanan masyarakat yang demokratis, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karakteristik masyarakat madani antara lain adanya ruang publik yang bebas bagi warga negara untuk menyalurkan gagasan, pendapat, dan kreativitas, baik secara individual maupun kolektif melalui berbagai media. Selain itu, masyarakat madani ditandai oleh pola kehidupan yang demokratis, sikap toleransi terhadap keberagaman, penerimaan terhadap pluralisme, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan nilai keadilan guna menciptakan kehidupan sosial yang seimbang, aman, dan damai

### **Konsep Masyarakat Madani**

Secara etimologis, istilah masyarakat madani berasal dari kata madinah yang berarti kota atau peradaban. Dalam konteks Islam, masyarakat madani merujuk pada suatu tatanan masyarakat yang berperadaban, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta etika sosial. Konsep ini sering dikaitkan dengan masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Makkah, yang dikenal sebagai masyarakat plural, adil, dan berlandaskan hukum serta kesepakatan bersama. Dalam kajian modern, masyarakat madani kerap disepadankan dengan konsep civil society, yaitu ruang sosial yang berada di antara negara dan individu, di mana masyarakat dapat berorganisasi secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. Ruang ini memungkinkan warga untuk menyalurkan aspirasi, mengontrol kekuasaan, serta membangun solidaritas sosial secara sukarela. Namun demikian, masyarakat madani dalam perspektif Islam memiliki ciri khas tersendiri karena tidak hanya bertumpu pada kebebasan dan partisipasi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan moral spiritual.

Menurut (Sadiyah & Assidiqi, 2024) pemahaman terhadap ajaran agama memegang peranan yang sangat penting. Ketika seseorang memahami teks-teks agama, seperti Al-Qur'an dan hadis, secara tidak komprehensif dan terlepas dari konteksnya, maka praktik keberagaman yang muncul cenderung bersifat kaku dan sempit. Penafsiran yang hanya berorientasi pada aspek literal tanpa memperhatikan tujuan ajaran Islam (maqāṣid al-syarī'ah) berpotensi melahirkan sikap eksklusif, intoleran, dan menutup ruang dialog sosial. Kondisi ini bertentangan dengan semangat masyarakat madani yang menuntut keterbukaan, musyawarah, serta penghormatan terhadap perbedaan. Oleh karena itu, pemahaman agama yang holistik dan kontekstual menjadi prasyarat penting agar nilai-nilai Islam dapat berfungsi sebagai fondasi etis bagi terbentuknya masyarakat yang beradab dan inklusif.

Di Indonesia, keberagaman busana merupakan hal yang wajar karena masyarakatnya menganut berbagai agama, keyakinan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Setiap kelompok memiliki cara tersendiri dalam mengekspresikan identitas dan nilai-nilai

yang diyakininya melalui pakaian yang dikenakan. Namun, perbedaan tersebut bukanlah sebuah masalah, melainkan kekayaan budaya yang mencerminkan semangat toleransi dan saling menghargai. Keberagaman busana justru menjadi simbol persatuan dalam perbedaan, di mana setiap individu bebas mengekspresikan jati dirinya tanpa mengganggu hak dan kenyamanan orang lain. Kondisi ini mencerminkan praktik nyata kehidupan masyarakat madani yang menjunjung tinggi nilai kebebasan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak individu. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa karakteristik utama masyarakat madani antara lain: (1) penegakan supremasi hukum, (2) adanya kesetaraan dan keadilan sosial, (3) penghormatan terhadap hak asasi manusia, (4) toleransi terhadap perbedaan, dan (5) partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Karakteristik tersebut selaras dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam yang menempatkan keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Masyarakat Madani dalam Perspektif Islam**

Menurut (Mujtahid, 2001) Agama merupakan sumber pertama dan utama bagi pemeluknya dalam membentuk pandangan hidup, sikap, serta perilaku sehari-hari. Melalui ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya, agama memberikan pedoman moral, etika, dan spiritual yang menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak. Nilai-nilai keagamaan tersebut kemudian disebarkan dan diinternalisasikan oleh para pemeluknya untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sosial, baik dalam hubungan dengan sesama manusia, lingkungan, maupun dengan Tuhan. Dengan demikian, agama tidak hanya dipahami sebagai sistem kepercayaan semata, tetapi juga sebagai kekuatan normatif yang berperan penting dalam membentuk karakter individu serta tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Di samping agama, sumber nilai juga lahir dari dalam diri manusia yang dikenal sebagai nilai insani, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dari akal, perasaan, dan pengalaman hidup manusia itu sendiri. Nilai insani berkembang seiring dengan proses interaksi sosial, kebudayaan, serta dinamika kehidupan masyarakat, sehingga mencerminkan kemanusiaan seperti kejujuran, keadilan, empati, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertindak secara rasional serta etis, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang terus berkembang. Dengan demikian, nilai insani berperan melengkapi nilai-nilai keagamaan dalam membangun kehidupan yang bermakna, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam perspektif Islam, masyarakat madani dibangun di atas landasan tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah SWT. Tauhid tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Dengan tauhid, manusia menyadari bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, sehingga tidak ada ruang bagi diskriminasi, penindasan, dan ketidakadilan.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang menekankan perintah berbuat adil, berbuat kebajikan, dan melarang perbuatan keji serta permusuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dan moralitas social merupakan fondasi utama masyarakat yang beradab. Prinsip persaudaraan (ukhuwwah) juga menjadi ciri penting masyarakat madani dalam Islam. Islam mengenal beberapa bentuk

persaudaraan, yaitu ukhuwwah islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan). Ketiga bentuk persaudaraan ini menunjukkan bahwa Islam mendorong terciptanya solidaritas sosial yang luas dan inklusif.

Contoh konkret penerapan nilai persaudaraan dan toleransi dapat dilihat dalam Piagam Madinah. Piagam ini mengatur hubungan antarwarga Madinah secara adil, tanpa membedakan latar belakang agama dan suku. Setiap kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai pluralitas dan keberagaman. Selain itu, prinsip musyawarah (syura) merupakan elemen penting dalam masyarakat madani Islam. Musyawarah menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern, di mana kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan dikontrol oleh partisipasi publik.

Islam juga menekankan konsep amar ma'ruf nahi munkar sebagai mekanisme kontrol sosial. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga moralitas publik dan mencegah terjadinya penyimpangan sosial. Dalam konteks masyarakat madani, amar ma'ruf nahi munkar harus dilaksanakan secara bijaksana, persuasif, dan berlandaskan nilai kemanusiaan, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Dengan demikian, masyarakat madani dalam perspektif Islam merupakan tatanan sosial yang tidak hanya menjunjung tinggi hukum dan keadilan, tetapi juga berlandaskan nilai spiritual, moral, dan etika. Integrasi antara dimensi spiritual dan sosial inilah yang menjadi kekuatan utama konsep masyarakat madani dalam Islam.

### **Relevansi Masyarakat Madani bagi Kehidupan Sosial di Indonesia**

Menurut (Soleh, 2005) Demokrasi telah menjadi isu penting dalam kehidupan masyarakat modern saat ini karena berkaitan langsung dengan cara kekuasaan dijalankan dan hak-hak warga negara dijamin. Sebagai sistem pemerintahan dan nilai kehidupan, demokrasi menekankan prinsip partisipasi rakyat, persamaan hak, kebebasan berpendapat, serta penegakan hukum yang adil. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, demokrasi dipandang sebagai sarana untuk mengakomodasi perbedaan kepentingan melalui mekanisme musyawarah dan representasi. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur politik semata, tetapi juga sebagai budaya yang harus diinternalisasikan dalam kehidupan sosial guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas masyarakat.

Kenyataan tersebut tidak mengecualikan masyarakat Islam. Didorong oleh keinginan untuk menghadirkan Islam sebagai ideologi modern dan sistem pemerintahan yang progresif, para ilmuwan dan pemikir Muslim menafsirkan kembali teori politik dan yuridis Islam dalam kerangka demokrasi. Penafsiran ulang ini kemudian beririsan dengan konsep masyarakat madani, yaitu suatu tatanan sosial yang menempatkan warga sebagai subjek aktif dalam kehidupan publik, menjunjung nilai keadilan, musyawarah, kebebasan berpendapat, serta tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, demokrasi dipahami bukan semata sebagai sistem politik, melainkan sebagai budaya sosial yang

memungkinkan tumbuhnya masyarakat madani yang beradab dan berkeadilan.

Melalui integrasi nilai-nilai Islam dan prinsip demokrasi, masyarakat madani dalam perspektif Islam diposisikan sebagai ruang etis di antara individu dan negara, tempat berlangsungnya partisipasi publik, kontrol sosial, dan penguatan solidaritas umat. Nilai-nilai Islam seperti *shūrā* (musyawarah), *al-'adl* (keadilan), *al-musāwah* (persamaan), dan *ukhuwah* (persaudaraan) menjadi landasan moral yang menopang praktik demokrasi sekaligus memperkuat keberadaan masyarakat madani. Dengan demikian, upaya membangun masyarakat madani di kalangan umat Islam tidak hanya berorientasi pada kebebasan politik, tetapi juga pada pembentukan tatanan sosial yang bermoral, toleran, dan berkeadaban, sesuai dengan kebutuhan kehidupan sosial di Indonesia yang plural dan demokratis.

Nilai-nilai masyarakat madani dalam perspektif Islam memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kehidupan sosial di Indonesia. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia membutuhkan fondasi nilai yang mampu menjaga persatuan dalam keberagaman. Prinsip toleransi dan keadilan yang diajarkan dalam Islam sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat madani. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan prinsip tauhid, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan, sementara sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam.

Dalam konteks kehidupan sosial, penerapan konsep masyarakat madani dapat mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menjaga harmoni sosial. Organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai masyarakat madani kepada masyarakat. Selain itu, konsep masyarakat madani juga relevan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di Indonesia, seperti konflik horizontal, intoleransi, dan ketimpangan sosial. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam yang inklusif dan humanis, masyarakat Indonesia dapat membangun kehidupan sosial yang lebih adil, damai, dan berkeadaban.

## **Kesimpulan dan Saran**

Konsep masyarakat madani dalam perspektif Islam merupakan konsep yang komprehensif dan integral, yang menggabungkan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat madani dalam Islam dibangun di atas prinsip tauhid, keadilan, persaudaraan, toleransi, musyawarah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah dipraktikkan secara historis dalam kehidupan masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai masyarakat madani dalam Islam memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kehidupan sosial di Indonesia yang plural dan multikultural. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam menjaga persatuan, keadilan sosial, dan kehidupan demokratis. Dalam menghadapi berbagai

tantangan sosial, seperti intoleransi, konflik horizontal, dan ketimpangan sosial, konsep masyarakat madani dapat menjadi kerangka etis dan sosial yang solutif.

Oleh karena itu, penguatan konsep masyarakat madani berbasis nilai-nilai Islam perlu terus dilakukan melalui pendidikan, dakwah, dan peran aktif masyarakat sipil. Sinergi antara nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan diharapkan mampu mewujudkan kehidupan sosial Indonesia yang harmonis, adil, dan berkeadaban di masa depan. Berdasarkan hasil kajian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, lembaga pendidikan, khususnya pendidikan islam, diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat madani dalam kurikulum dan proses pembelajaran guna membentuk karakter peserta didik yang toleran, demokratis, dan berkeadaban.

Kedua, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada persatuan bangsa, sehingga nilai-nilai masyarakat madani dapat terinternalisasi secara luas dalam kehidupan sosial. Ketiga, pemerintah diharapkan dapat menciptakan kebijakan publik yang mendukung penguatan masyarakat madani, seperti menjamin kebebasan berpendapat, menegakkan keadilan hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. Keempat, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji konsep masyarakat madani secara empiris dengan pendekatan lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi nilai-nilai masyarakat madani dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Fazillah, N. (2017). Konsep Civil Society Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer. [https://web.archive.org/web/20180418130152id\\_/http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/lubb/article/viewFile/753/548](https://web.archive.org/web/20180418130152id_/http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/lubb/article/viewFile/753/548)
- Ilma, M., & Alfian, R. N. (2020). Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Bingkai Pendidikan Islam. *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(01), 25–46. <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i01.2186>
- Mujtahid, M. (2001). Menghidupkan nilai agama: Upaya membangun moralitas kekuasaan dan masyarakat madani. *Jurnal Bestari*, 14(32), 27–35. <https://repository.uin-malang.ac.id/1880/1/1880.pdf>
- Sadiyah, D., & Assidiqi, A. H. (2024). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang [mujtahid@pai.uin-malang.ac.id](mailto:mujtahid@pai.uin-malang.ac.id). 5. <https://repository.uin-malang.ac.id/23029/2/23029.pdf>
- Soleh, A. K. (2005). Islam dan demokrasi. *El-Jadid: Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam*, 3(1), 111–126. <https://repository.uin-malang.ac.id/15166/7/15166.pdf>